

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Kristina Tanan (1492140005)

Jurusan Akuntansi

Universitas Negeri Makassar

Pembimbing I: Samirah Dunakhir, S.E.,M.Bus.,Ph.D.,Ak.,CA.

Pembimbing II: M. Ridwan Tikollah, S.Pd.,M.SA.

Ringkasan. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja, dan (2) untuk mengetahui besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja. Variabel penelitian ini adalah (1) pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2) sebagai variabel bebas, dan (2) pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tana Toraja dengan sampel lima tahun mulai tahun 2013 sampai 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kontribusi dan analisis efektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai 2017 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10 persen, 7,9 persen, 9,3 persen, 7,2 persen, dan 6,5 persen dengan kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 sampai 2015 sebesar 71,8 persen, 72,7 persen, 61,6 persen dengan kriteria sangat baik dan pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,5 persen dan 5,74 persen dengan kriteria sangat kurang.

Summary. This research aimed (1) to determine the size of the contribution of regional tax es and regional retribution partially to the regional revenue of Tana Toraja Regency, and (2) to find out the contribution of regional taxes and regional retribution simultaneously to the regional revenue of Tana Toraja Regency. The variables of this research are (1) regional tax (X_1), regional retribution (X_2) as independent variables, and (2) regional revenue as dependent variable (Y). The population of this research are reports on the realization of the regional revenue and expenditure budget in Tana Toraja Regency and the sample are five year starting from 2013 to 2017. The data were collected by documentation. The data obtained were analysis technique is done by contribution analysis and effectiveness analysis.

The results of this research shows that in 2013 to 2017 the contribution of Regional Taxes to Regional Original Revenues was 10 percent, 7.9 percent, 9.3 percent, 7.2 percent, and 6.5 percent with very low criteria, while the Regional Retribution contribution towards Regional Original Revenues in 2013 to 2015 amounting to 71.8 percent, 72.7 percent, 61.6 percent with very good criteria and in 2016 and 2017 at 5.5 percent and 5.74 percent with very low criteria.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya sejumlah penyerahan kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan (Juri, 2012). Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang

Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh dua Undang-Undang di bidang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Samudra (2015:38) “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan menurut Darwin (2010:5) “Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan Daerah dalam pengambilan keputusan Daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan potensi dan kepentingan Daerah itu sendiri”.

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus berupaya mengembangkan potensi-potensi Daerah salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu Daerah dapat membiayai kegiatan Pemerintah dan pembangunan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, “Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga menjadi salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah sebagaimana halnya Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah,

untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi-Selatan. Kabupaten Tana Toraja yang mendiami Daerah dataran tinggi/pegunungan memiliki beragam kawasan wisata serta budaya yang unik. Hal ini dapat berpotensi menghasilkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup besar yang bersumber dari sektor pariwisata, perdagangan, hotel, dan penerimaan lainnya.

2. Tinjauan Pustaka

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Yani (2013:51) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain Asli Daerah yang Sah" sedangkan menurut Halim (2004:96) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi, sedangkan menurut Yani (2013:51) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

c. Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Menurut Darwin (2010:67) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- 2) Keuntungan Perusahaan Milik Daerah,
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

d. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Yani (2013: 52)

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Sedangkan menurut Darwin (2010:68) “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”.

e. Jenis dan Objek Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dipungut oleh:

Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/kota, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

f. Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”. Sedangkan menurut Samudra (2015: 54) “Retribusi Daerah merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah”.

g. Jenis dan Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek Retribusi Daerah adalah:

1) Retribusi Jasa Umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

h. Kontribusi

Menurut Kamus ekonomi (Guritno 1997:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2010:145), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil.

- a. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dihitung dengan menggunakan rumus

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rumus =
$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

i. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penelitian dan Kinerja Keuangan. Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rumus =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Metode Penelitian

Berdasarkan topik penelitian, maka yang menjadi variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) sebagai variabel bebas (*independent variable*), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) sebagai variabel terikat (*dependent variable*).

Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah (X_1) yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air

tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Retribusi Daerah (X_2) yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2013 sampai 2017. Untuk memperoleh data dan informasi, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kontribusi dan analisis efektivitas.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) yaitu realisasi pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diukur berdasarkan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat direalisasikan dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pajak Daerah (X_1) adalah realisasi pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak

air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah ini diukur berdasarkan besarnya Pajak Daerah yang dapat direalisasikan dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

3. Retribusi Daerah (X_2) yaitu realisasi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk kepentingan orang pribadi/badan yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah ini diukur berdasarkan besarnya Retribusi Daerah yang dapat direalisasikan dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja. Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja. Sampel dalam penelitian ini yaitu semua data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2013 sampai 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri, No. 690.900.327

Untuk menghitung tingkat efektivitas per jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri, No. 690.900.327

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pada kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar 10 persen, tahun 2014 sebesar 7,9 persen, tahun 2015 sebesar 9,3 persen, tahun 2016 sebesar 7,2 persen, dan tahun 2017 sebesar 6,5 persen termasuk dalam kriteria sangat kurang. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2013 sampai 2016 sebesar 161,8 persen, 128,8 persen, 148,4 persen, 110,2 persen dan termasuk dalam kriteria sangat efektif sedangkan pada tahun 2017 sebesar 87,7 persen dan termasuk dalam cukup

efektif. Jika dilihat dari tingkat efektivitasnya, persentase Pajak Daerah lebih tinggi dari tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan. Artinya Pajak Daerah sudah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil analisis pada kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sampai 2015 sebesar 71,8 persen, 72,7 persen, 61,6 persen yang termasuk dengan kriteria sangat baik, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 persentase sebesar 5,5 persen dan 5,74 persen yang termasuk dalam kriteria sangat kurang. Jika dilihat dari tingkat efektivitas Retribusi Daerah pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 100,9 persen dan 131,8 persen termasuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2015 sebesar 96,8 persen termasuk dalam kriteria efektif, sedangkan tahun 2016 dan 2017 sebesar 87 persen dan 83,5 persen termasuk dalam kriteria cukup efektif. Jika dilihat dari tingkat efektivitasnya, persentase efektivitas Retribusi Daerah lebih rendah dari tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektivitas, dapat disimpulkan bahwa:

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2013 sampai 2017 secara berturut-turut sebesar 10 persen, 7,9 persen, 9,3 persen, 7,2 persen, 6,5 persen yang termasuk dalam kriteria sangat kurang. Berdasarkan tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2013 sampai 2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif sedangkan pada tahun 2017 termasuk dalam kriteria cukup efektif.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2013 sampai 2017 secara berturut-turut sebesar

71,8 persen, 72,7 persen, 61,6 persen, 5,5 persen, 5,74 persen. Kontribusi pada tahun 2013 sampai 2015 sangat baik sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Berdasarkan tingkat efektivitas Retribusi Daerah pada tahun 2013 sampai 2017 masing-masing sebesar 100,9 persen, 132 persen, 96,8 persen, 87 persen 83,5 persen dengan kriteria masing-masing sangat efektif, efektif, dan cukup efektif.

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sampai 2015 sudah sangat baik namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar lebih realistis dalam menentukan dan/atau menetapkan target pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak hanya berpatokan pada target tahun-tahun sebelumnya tetapi juga memperhatikan potensi pajak maupun retribusi yang ada. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari pajak dan retribusi yang dibayarkan baik bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi maupun bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Bagi peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya berfokus pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun untuk semua jenis dari komponen Pendapatan Asli Daerah serta

dapat melihat pengaruh dari masing-masing komponen tersebut.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan*: Inggris-Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN.
- Hendaris, R. B. (2013). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Jawa Barat: Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Ifa, Khoirul. (2016). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember*. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak. Jawa Timur: STIE Widya Gama Lumajang.
- Juri, M. (2012, Maret). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. Jurnal Eksis, 8(1), 2001-2181.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penelitian dan Kinerja Keuangan.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.

Najah, Naqib.(2014). *Suku Toraja Fanatisme Filosofi Leluhur*. Makassar: ARUS TIMUR.

Nugroho, Adi. (2013). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Jawa Tengah: Universitas Dian Nuswantoro.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tangdilintin. (2009). *Toraja Sebuah Penggalan Sejarah dan Budaya*. Makassar: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

www.tanatorajakab.go.id